RENCANA AKSI KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET.
		TW I	TW 2	TW 3	TW 4										TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	1. PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan					87%	**3,363,000,420**														
								1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Persentase pengawasan internal yang dilaksanakan			100%	**2,488,000,420**														
									2. Persentase objek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT			100%															
										1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	3 Laporan	67,500,000	Irban I, II, III														Audit Kinerja Program
										2.Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	30 Laporan	700,000,000	Irban I, II, III														Audit Pengelolaan Dana BOS, Audit Operasional / Audit Ketaatan Perangkat Daerah dan Kecamatan
										3.Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	10 Laporan	228,000,000	Irbansus, Irban I, II, III														Reviu RPJMD, Reviu Renstra, Reviu RKPD Murni 2026 dan RKPD Perubahan 2025, Reviu Renja Perangkat Daerah, Reviu SSH dan ASB, Reviu Pelayanan Publik, Reviu Optimalisasi PAD, Reviu LPPD, Reviu P3DN, Evaluasi SAKIP
										4.Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	12 Laporan	230,000,000	Irban I, II, III														Reviu LK SKPD, Reviu LKPD, Reviu RKA Murni 2026 dan RKA Perubahan 2025, Reviu DAK Fisik dan Non Fisik
										5.Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	33 Laporan	456,500,000	Irban I, II, III														Audit Dana Desa dan ADD
										6.Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 Kesepakatan	250,000,420	Irban I, II, III														Kegiatan Saber Pungli
										7.Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	10 Dokumen	556,000,000	Irbansus, Irban I, II, III														Monitoring TLHP APIP dan BPK RI
								2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan			90%	**875,000,000**															
										8.Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	9 Laporan	200,000,000	Irbansus														Penanganan penyelesaian KNKD
										9.Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	30 Laporan	675,000,000	Irbansus														Audit PKN, Riksus atas permintaan KDH, laporan masyarakat dan APH

						2. PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengendalian intern pemerintah pada Perangkat Daerah					90%	**1,458,975,000**															
								3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang dirumuskan			90%	**680,000,000**															
										10.Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1 Rekomendasi	350,000,000	Irbansus, Irban I, II, III														Penyusunan PKPT
										11.Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	4 Rekomendasi	330,000,000	Irbansus, Irban I, II, III														Pengisian Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
								4. Pendampingan dan Asistensi	1. Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah			90%	**778,975,000**															
									2. Nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP)			90,00																
									3. Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)			72,00																
										12.Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	30 Perangkat Daerah	359,000,000	Irbansus, Irban I, II, III														Asistensi Maturitas SPIP bersama BPKP, Pendampingan Penyusunan Risk Register Perangkat Daerah dan Pendampingan Pengawasan Lainnya
										13.Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi,verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	40 Perangkat Daerah	50,000,000	Irbansus														Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
										14.Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	4 Kegiatan	294,900,000	Irbansus														Pendataan LHKPN, Kegiatan MCP KPK, Kegiatan UPG, Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi
										15.Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	10 Perangkat Daerah	75,075,000	Irbansus, Irban I, II, III														Permintaan asistensi, pendampingan dan telaah
						3.PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran					90%	**17,858,538,481**															
								5.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu			90%	**221,000,000**															

										16.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	9 Dokumen	100,000,000	Sekretaris																	Kegiatan Sekretariat
										17.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	64,000,000	Sekretaris																	Kegiatan Sekretariat
										18.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	57,000,000	Sekretaris																	Kegiatan Sekretariat
								6.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan			100%	**9,302,358,561**																	
										19.Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32 Orang / Bulan	9,001,182,572.50	Sekretaris																	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS
										20.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	184,175,988	Sekretaris																	Kegiatan Sekretariat
										21.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Laporan	100,000,000	Sekretaris																	Kegiatan Sekretariat
										22.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	12 Laporan	17,000,000	Sekretaris																	Kegiatan Sekretariat
								7.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			90%	**1,923,679,897**																	
										23.Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	65 Paket	318,189,897	Sekretaris																	Pengadaan Pakaian Dinas
										24.Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	16 Dokumen	100,000,000	Sekretaris																	Pengolahan Data Pegawai
										25.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25 Orang	1,005,000,000	Sekretaris																	Diklat/Bimtek Auditor
										26.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	15 Orang	500,490,000	Sekretaris																	Bimtek Non Auditor

								8.Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah			90%	**3,073,098,800**																
										27.Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	141,100,000	Sekretaris														Operasional Kantor
										28.Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	64 Paket	1,847,674,800	Sekretaris														Operasional Kantor
										29.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	25 Paket	75,000,000	Sekretaris														Operasional Kantor
										30.Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	615,000,000	Sekretaris														Operasional Kantor
										31.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	32,000,000	Sekretaris														Operasional Kantor
										32.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 Dokumen	11,949,000	Sekretaris														Operasional Kantor
										33.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	34 Laporan	350,375,000	Sekretaris														Operasional Kantor
								9.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	**880,587,744**																
										34.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	337,589,896	Sekretaris														Operasional Kantor
										35.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	542,997,848	Sekretaris														Operasional Kantor
								10.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMD Perangkat Daerah			90%	**2,457,813,480**																
										36.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Penyediaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	25 Unit	257,780,000	Sekretaris														Operasional Kantor
										37.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34 Unit	115,000,000	Sekretaris														Operasional Kantor
										38.Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	1,175,475,256	Sekretaris														Operasional Kantor

										39.Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit	909,558,223.50	Sekretaris												Operasional Kantor

Kuala Pembuang, 31 Januari 2025

Inspektur Daerah,

DWOMO KOESWOYO, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770325 199612 1 001